

## **BAB V**

### **SIMPULAN dan SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa keadilan dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 270 orang Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji regresi bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
2. Berdasarkan hasil uji regresi bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
3. Hasil penelitian secara simultan variabel keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

4. Berdasarkan hasil penelitian descriptive, pemahaman terkait keadilan pajak secara keseluruhan lebih dipahami oleh Wajib Pajak Laki-Laki dengan umur Wajib Pajak 20-24 tahun dan berpendidikan terakhir S2
5. Berdasarkan hasil penelitian descriptive, pemahaman terkait Sistem Perpajakan *Self Assessment* secara keseluruhan lebih dipahami oleh Wajib Pajak Laki-Laki dengan umur responden 25-35 tahun dan berpendidikan terakhir S2
6. Berdasarkan hasil penelitian descriptive, pemahaman terkait Penggelapan Pajak secara keseluruhan lebih dipahami oleh Wajib Pajak Laki-Laki dengan umur responden diatas 35 tahun dan berpendidikan terakhir S2

### 5.2 Saran

Hasil menyatakan bahwa keadilan dan sistem perpajakan sangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung maka perlu adanya analisa dan tindaklanjut mengenai keadilan dan sistem perpajakan dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar penggelapan pajak dapat dikurangi, pemerintah sebagai penyusun Undang-Undang harus selalu bersikap adil dalam menetapkan tarif pajak sesuai dengan kemampuan WP dalam membayar kepada seluruh Wajib Pajak baik secara horizontal maupun secara vertikal dengan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Pemerintah sebaiknya memperbaiki system perpajakan yang telah diterapkan agar lebih memadai dan Wajib Pajak tidak memiliki celah untuk melakukan penggelapan pajak. Dan pihak KPP Pratama Kota Bandung harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia kepada Wajib Pajak. Dengan peningkatan sistem perpajakan maka penggelapan pajak dapat dikurangi.
3. Pemerintah diharapkan tidak hanya memperbaiki sistem atau bersikap adil saja namun, kedua nya harus diperbaiki bersama-sama agar penggelapan pajak di Indonesia lebih cepat berkurang.
4. Agar Penggelapan pajak dapat dikurangi, maka akademisi dapat ikut serta memerangi penggelapan pajak dengan membekali mahasiswa pengetahuan lebih tentang perpajakan khususnya keadilan, sistem perpajakan dan penggelapan pajak sehingga setelah memasuki dunia pekerjaan, mahasiswa tersebut dapat memahami dampak buruk penggelapan pajak bagi banyak pihak. Sehingga penggelapan pajak dapat diminimalisir.
5. Agar penggelapan pajak dapat dikurangi, maka Praktisi Perpajakan yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak lebih berhati-hati dalam menghitung, membayar dan melaporkan Pajak kliennya dengan memahami lebih baik bisnis kliennya dan memeriksa lebih detail apakah pencatatan atau pembukuan pajak klien sudah benar.

6. Tidak hanya membantu menghitung, membayar dan melaporkan pajak kliennya, sebaiknya Praktisi Pajak memberikan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia agar wajib pajak lebih memahami system perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah responden dan wilayah penelitian yang lebih luas sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik. Penelitian tidak hanya dilakukan di satu KPP namun beberapa KPP agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi.
8. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, ketepatan pengalokasian, teknologi informasi dan budaya yang berbeda.
9. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan kuisisioner untuk memperoleh data tapi juga melakukan wawancara secara langsung. Agar dapat diidentifikasi factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak.